

ANALISA RATIO APBD

Oleh :

Bambang Heru P.,

Analisa Ratio APBD

APAKAH ANALISA KEUANGAN ITU?

ANALISA KEUANGAN ADALAH USAHA MENGIDENTIFIKASI CIRI-CIRI KEUANGAN BERDASARKAN LAP'ORAN KEUANGAN YANG TERSEDIA. PENGGUNAAN ANALISA RATIO PADA SEKTOR PUBLIK KHUSUSNYA TERHADAP APBD BELUM BANYAK DILAKUKAN SEHINGGA SECARA TEORI BELUM ADA KESEPAKAIAN SECARA BULAT MENGENAI KAIDAH DAN PENGUKURANNYA.

(Widodo dalam Halim 2004)

JENIS-JENIS ANALISA RATIO

1. RATIO LIQUIDITAS

- CURRENT RATIO
- CASH RATIO
- QUICK RATIO
- NET WORKING RATIO

2. RATIO LEVERAGE

- DEBT RATIO
- DEBT TO EQUITY RATIO
- TIME INTEREST EARNED RATIO

3. RATIO AKTIVITAS

- PERIODE PENGUMPULAN UTANG
- PERPUTARAN PIUTANG
- PERPUTARAN PERSEDIAAN
- PERPUTARAN AKTIVA TETAP

4. RATIO PROFITABILITAS - GROSS PROPIT MARGIN

- OPERATING PROFIT MARGIN
- NET FROFIT MARGIN
- RETURN ON INVESTMENT (ROI)
- RETURN ON EQUITY
- EARNING POWER

KEGUNAAN ANALISIS RATIO PADA SEKTOR PUBLIK (APBD)

- MENILAI KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DALAM MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
- MENGUKUR EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DALAM MEREALISASIKAN PENDAPATAN DAERAH
- MENGUKUR SEJAUHMANA AKTIVITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBELANJAKAN PENDAPATAN DAERAHNYA.
- MENGUKUR KONTRIBUSI MASING-MASING SUMBER PENDAPATAN DALAM PEMBENTUKAN PENDAPATAN DAERAH
- MELIHAT PERTUMBUHAN / PERKEMBANGAN PEROLEHAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN YANG DILAKUKAN SELAMA PERIODE WAKTU TERTENTU

(Widodo dalam Halim 2004)

PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN RATIO KEUANGAN -PADA APBD ADALAH

1. DPRD
2. PIHAK EKSEKUTIF SEBAGAI LANDASAN DALAM MENYUSUN APBD BERIKUTNYA.
3. PEMERINTAH PUSAT / PROPINSI SEBAGAI BAHAN MASUKAN DALAM PEMBINAAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
4. MASYARAKAT DAN KREDITOR, SEBAGAI PIHAK YANG AKAN TURUT MEMGLIKI SAHAM PEMERINTAH DAERAH, BERSEDIA MEMBERI PINJAMAN ATAUPUN MEMBERI OBLIGASI.

(Widodo dalam Halim 2004)

ANALISA RATIO PADA APBD DILAKUKAN DENGAN:

1. MEMBANDINGKAN HASIL YANG DICAPAI DARI SUATU PERIODE DIBANDINGKAN DENGAN PERIODE SEBELUMNYA^SEHINGGA DAPAT DIKETAHUI BAGAIMANA KECENDERUNGAN YANG TERJADI.
2. MEMBANDINGKAN DENGAN RATIO KEUANGAN DAERAH LAIN. YANG TERDEKAT ATAUPUN YANG POTENSI DAERAHNYA RELATIF SAMA UNTUK DDLIHAT BAGAIMANA POSISI RATIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERSEBUT TERHADAP PEMERINTAH DAERAH LAIN

(Widodo dalam Halim 2004)

RATIO YANG DAPAT DIKEMBANGKAN BERDASARKAN DATA KEUANGAN BERSUMBER DARI APBD

- RATIO KEMANDIRIAN (OTONOMIFISKAL)
- RATIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH MENUNJUKKAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM R&MBIAYAI SENDIRI KEGIATAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG TELAH MEMBAYAR PAJAK DAN RETRIBUSI SEBAGAI SUMBER ~~PENDAPATAN YANG DIPERLUKAN~~ DAERAH, RUMUS:

PENDAPATAN ASLI DAERAH

RATIO KEMANDIRIAN

BANTUAN PP / PROPINSI DAN PINJAMAN

(Widodo dalam Halim 2004)

RATIO KEMANDIRIAN MENGGAMBARAKAN KETERGANTUNGAN DAERAH TERHADAP SUMBER DANA EKSTERN

Proposisi

SEMAKIN TINGGI RATIO KEMANDIRIAN MENGANDUNG ARTI BAHWA TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH TERHADAP BANTUAN PIHAK EKSTERN (TERUTAMA PEMERINTAH PUSAT DAN PROPINSI) SEMAKIN RENDAH, DAN DEMIKIAN PULA SEBALIKNYA.

SEMAKIN TINGGI RATIO KEMANDIRIAN, SEMAKIN TINGGI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG MERUPAKAN KOMPONEN UTAMA PENDAPATAN ASLI DAERAH

SEMAKIN TINGGI MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH AKAN MENGGAMBARAKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG SEMAKIN TINGGI

(Widodo dalam Halim 2004)

2. RATIO EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

A. RATIO EFEKTIVITAS:

MENGGAMBARAKAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM

MEREALISASIKAN PAD YANG DIRENCANAKAN DIBANDINGKAN DENGAN TARGET YANG DITETAPKAN BERDASARKAN POTENSI RIIL DAERAH

PROPOSISI: KINERJA PEMDA DALAM MELAKUKAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN DIKATEGORIKAN EFISIEN APABIL RATIO YANG DICAPAI KURANG DARI 1 (SATU) ATAU DIABWAH 100%

SEMAKIN TINGGI RATIO
EFEKTIVITAS, MENGGAMBARAKAN
KEMAMPUAN DAERAH YANG SEMAKIN BAIK

RUMUS:

RATIO EFEKTIVITAS (REf)

Sumber: (Halim 2004)

BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK MEMUNGUT PAD

REALISASI PENERIMAAN PAD

3. RATIO AKTIVITAS

A. RATIO KESERASIAN

RATIO INI MENGGAMBARAKAN BAGAIMANA PEMERINTAH DAERAH MEMPRIORITASKAN ALOKASI DANANYA PADA BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN SECARA OPTIMAL.

PROPOSISI: SEMAKIN TINGGI PROSENTASE DANA YANG DIALOKASIKAN UNTUK BELANJA RUTIN BERARTI PROSENTASE BELANJA INVESTASI (BELANJA PEMBANGUNAN) Y/NG DIGUNAKAN UNTUK MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA EKONOMI MASYARAKAT CENDERUNG SEMAKIN KECIL

RUMUS

RATIO BELANJA RUTIN TERHADAP APBD

$$\frac{\text{TOTAL BELANJA RUTIN}}{\text{TOTAL APBD}}$$

RATIO BELANJA PEMBANGUNAN TERHADAP APBD

$$\frac{\text{TOTAL BELANJA PEMBANGUNAN}}{\text{TOTAL APBD}}$$

Sumber: (Halim 2004)

4. DEBT SERVICE COVERAGE RATIO

A. KETENTUAN YANG MENYANGKUT PERSYARATAN

- 1) JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN DAERAH YANG WAJIB DIBAYAR MAKSIMAL 75% DARI PENERIMAAN APBD TAHUN SEBELUMNYA
- 2) DSCR MINIMAL 2,5

DSCR MERUPAKAN PERBANDINGAN ANTARA PENJUMLAHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BAGIAN DAERAH (BD) DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM DAN BAGIAN DAERAH LAINNYA SERTA DANA ALOKASI UMUM SETELAH DIKURANGI BELANJA WAJIB (BW), DENGAN PENJUMLAHAN ANGSURAN POKOK, POKOK BUNGA DAN BIAYA PINJAMAN LAINNYA YANG JATUH TEMPO

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{TOTAL (POKOK ANGSURAN+BUNGA+BIAYA PINJAMAN)}}$$

Sumber: (Halim 2004)



B. KETENTUAN YANG MENYANGKUT PENGGUNAAN PINJAMAN

- 1) PINJAMAN JANGKA PANJANG DIGUNAKAN MEMBIAYAI PEMBANGUNAN YANG DAPAT MENGHASILKAN PENERIMAAN KEMBALI UNTUK PEMBAYARAN PINJAMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT
- 2) PINJAMAN JANGKA PENDEK UNTUK PENGATURAN ARUS KAS

C. KETENTUAN YANG MENYANGKUT PROSEDUR

- 1) MENDAPAT PERSETUJUAN DPRD
- 2) DITUANGKAN DALAM KONTRAK

(Halim 2004)



Daftar Pustaka:

Halim A, 2014. Bunga rampai Manajemen Keuangan Daerah Kasus Kabupaten Boyolali (Widodo), Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN